

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Ida Farida

id4.farida06@gmail.com

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Self Stimulant Assistance Housing (BSPS) di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, kekuatan pengembangannya adalah membangun perumahan karena inisiatif dan upaya masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, restorasi, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, pada tahap pengembangan itu harus dilakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat bahwa pelaksana program ini tidak memiliki ketegasan karena masih memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara individu dan cenderung apatis terhadapnya. Meskipun mereka mengerti apa konsep dan tujuan program BSPS adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar mandiri dan efisien. Pelaksana dari Departemen Perumahan dan daerah perumahan serta fasilitator belum mampu mengundang masyarakat untuk sadar dan memahami konsep-konsep BSPS meskipun sosialisasi sebelumnya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Stimulan Perumahan Mandiri (BSPS).

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup individu maupun kelompok. Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup

penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu lekat dalam kehidupan wilayah

pedesaan maupun perkotaan yang menjadi focus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Indonesia. Rumah tidak layak huni dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang BSPS, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun rendahnya kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan dan permukiman kumuh telah menimbulkan berbagai masalah social.

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga mempunyai peran yang sangat strategis (Panudju, 2009:70). Namun, Turner (1976) menunjukkan bahwa di perumahan bagian paling dasar dari

lingkungan sehari-hari telah lari dari masyarakat. Perencana atau perancang biasa menilai perumahan sebagai produk, bukan sebagai proses.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan Pendataan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, masih ada 3,4 juta rumah tidak layak huni saat ini. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata (republika.com/Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia. diakses 18 Oktober 2017).

Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja. Ketidak layak hunian merupakan penjelmaan dari dampak yang diakibatkan dari faktor kemiskinan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni.

Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kegiatan ini dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu daerah pelaksana program BSPS ini yaitu Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Subang telah menjalankan Program BSPS tersebut guna meningkatkan kualitas rumah layak huni.

Kabupaten Subang adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BSPS). Saat ini dalam periode 2018 sudah 17 Kecamatan yang disalurkan program BSPS tahap pertama untuk 258 unit rumah, Kecamatan dimaksud yakni Kecamatan Cisalak, Tanjungsiang, Ciater, Cijambe, Serangpanjang, Jalancagak, Kasomalang, Compreng, Dawuan, Cikaum, Binong, Ciasem, Patokbeusi, Pagaden, Kalijati, Purwadadi, Cipunagara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Program ini khusus pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Definisi tentang BSPS menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13 tahun 2016 yaitu definisi mengenai Program

bantuan stimulan perumahan swadaya. BSPS adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Dalam Periode Tahun 2018-2019 sudah 17 Kecamatan yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Subang. Kecamatan-kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Cisalak, Kecamatan Tanjungsiang, Kecamatan Ciater, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Kasomalang, Kecamatan Compreng, Kecamatan dawuan, Kecamatan Cikaum, Kecamatan Binong, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Pagaden, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Cipunagara. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah kecamatan-kecamatan yang terpilih di Kabupaten Subang yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “ Untuk

mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang.”

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan serta hasil dari penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan Ilmu Administrasi khususnya ilmu administrasi public yang berhubungan dengan konsep-konsep Implementasi Kebijakan dalam Bantuan Stimulan Permukiman Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang.

2.1 Kajian Pustaka

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh James Anderson (2000) dalam Rusli (2013:38) sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan public mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata mata

merupakan pernyataan pemerintah, keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Secara terdefinisikan kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan.

Anderson dalam Budi Winarno (2002:15) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Woll (1966) dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2003:2) dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu :

Pertama, Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat

Kedua, Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketiga, Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jadi pada dasarnya, studi kebijakan publik berorientasi pada

penyelesaian masalah nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berbicara tentang kebijakan tidak akan lepas dari program sebagai pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:101) tahap implementasi kebijakan tidak mudah untuk dijalankan, dimana dalam tahap ini sering timbul penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).

Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan.

Hasilnya berupa 'produk' yang merupakan materialisasi dari visi. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2014:665), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Hasilnya berupa 'produk' yang merupakan materialisasi dari visi.

1. Model Edward III

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3.1. Metode Penelitian

Bentuk yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada (Bogdan dan Tylor dalam Moleong,2000 : 3)

Penggunaan Metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (key informant). Orientasi mengenai informan adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

3.2 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi atau sampel (Suyanto,2005 : 171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan

memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam hal ini, informan dikatakan sebagai seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu dan dapat memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005 : 172) informasi penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- 1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, Informan Kunci dalam penelitian ini adalah : Kepala Bidang Perumahan di Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten subang, alasan dipilih menjadi informan kunci adalah Bidang Perumahan Dinas perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan objek dan subjek rumah layak huni sehingga mengetahui tentang masalah yang diteliti.
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, informan utama dalam penelitian ini adalah :
 - Kepala Seksi Pengadaan dan Penyuluhan Perumahan di Dinas

perumahan dan kawasan permukiman kabupaten subang

- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan di Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten subang
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Perumahan di Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten subang
 - Fasilitator/Konsultan Pendamping
- 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer
Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan.
2. Teknik pengumpulan data sekunder
 - a) Penelitian kepustakaan yaitudengan mengumpulkan data dan informasi melalui literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta analisis peraturan daerah.

- b) Studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah masalah yang diteliti.

3.6 Analisis Data yang digunakan

- a) Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan catatan lapangan serta bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.
- c) Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif pengalaman suatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.
- d) Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006 :128), terdapat tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu :

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar abash dengan menggunakan pendekatan gand. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulai ada berbagai macam cara yaitu :

1. Triangulasi Data
Triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teori
Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data atau analisis data yang lebih lengkap dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komparatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumahan dan pemukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Kondisi ini telah menjadi agenda penting pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi hak asasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Termasuk juga Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, Pasal 28 H Ayat (1)

disebutkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterlibatan pemerintah melalui program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka.

Pada Pembahasan berikut ini peneliti akan menganalisis berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan di Kabupaten Subang sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan di Kabupaten Subang

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan sebuah program yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dibidang infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang. Program ini menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memang ditugaskan Presiden untuk menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian

pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan persampahan di daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan masalah sampah. Masyarakat sering keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah keterlibatan masyarakat dalam ikut serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung secara individu, keluarga, kelompok masyarakat sejak proses perencanaan penanganan sampah sampai akhirnya pada tahapan implementasi serta monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Adanya pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat

menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Merujuk pada model Implementasi menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yang penulis gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. Untuk melihat Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang dapat dilihat melalui variabel-variabel berikut ini :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2016. Sehingga pelaksanaannya tidak akan lari dari peraturan tersebut. Untuk standar program BSPS para pelaksana sudah mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan verifikasi. Pembangunan rumah tersebut sudah melalui seleksi dan rekomendasi dari kepala desa dan sebelumnya juga telah dilakukan pendataan rumah

layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Subang. Kebijakan program BSPS seharusnya disusun berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Indonesia belum mampu untuk berswadaya dalam pembangunan rumah. Pemerintah seharusnya mengetahui kelebihan dan kelemahan program BSPS sebelum dilaksanakan. Pemerintah mungkin bisa membuat program yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah tanpa adanya turun tangan dari masyarakat, dengan istilah masyarakat hanya terima bersih pembangunan tersebut.

2. Sumber Daya Dengan konsep pemberdayaan yang melekat pada kegiatan BSPS mengharuskan masyarakat penerima manfaat mampu membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kemampuan erkelompok dalam menyelesaikan pekerjaan pembuatan rumah tersebut. Sehingga dalam program BSPS dibentuk KPB (Kelompok penerima bantuan) yang terdiri dari 7 atau sampai 11 orang dalam setiap KPB. Dengan kata lain pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. Terdapat masalah dimana dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tapi pada kenyataannya masih dilakukan secara sendiri – sendiri.
3. Hubungan Antar Organisasi Untuk komunikasi dan aktivitas pengamatan dapat dikatakan lancar. Hubungan antara Dinas Perumahan

- dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat baik, dilihat dari respon mereka mengenai program BSPS di Kabupaten Subang. Selain itu pelaksanaannya dilakukan secara terbuka sehingga tidak menyebabkan bias dalam komunikasi dan penyampaian informasi.
4. Karakteristik Agen Pelaksana Proses pengurusan bantuan sampai pada tahap penyaluran dana semua dilakukan secara teratur dan merata. Karena anggaran terbatas dan tidak semua rumah yang ada dapat diberikan bantuan, Dinas Perkim juga bekerja sama dengan kepala desa dalam penentuan rumah mana yang benar-benar tidak layak huni dan kondisinya memprihatinkan agar dapat direkomendasikan ke pusat untuk mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya.
 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial yang terlihat ialah dimana satu kelompok penerima bantuan yang jumlahnya 10-15 orang/kelompok saling bertukar pikiran dalam pembangunan rumah mereka. Dari segi politik tidak melihat kepentingan-kepentingan politik dalam program ini. Kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan bantuan BSPS tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat, namun jika melihat dari kondisi kesehatan tentu sangat berpengaruh, masyarakat lebih terlindungi dari kondisi cuaca yang tidak selamanya menguntungkan, dan masyarakat lebih merasa aman tidak lagi merasa ketakutan dan aman.
- 6 Disposisi Implementor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan sampai tahap akhir penyelesaian pembangunan. Para aparat pemerintah, baik pada level Desa, Kecamatan, Kabupaten, Fasilitator dan warga masyarakat sendiri sebagai kelompok asaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya implementasi Program BSPS. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan sampai tahap akhir penyelesaian pembangunan. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Dimana dengan adanya program ini memberi suatu suntikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mau dan memampukan diri dalam menciptakan kondisi rumah yang layak baik secara fisik, sosial, ekonomi dan kesehatan.
- Saran
- Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang, penulis memberikan saran yaitu :
1. Sebelum program BSPS dilaksanakan, perlu diadakan pendampingan dengan yang waktu

lebih lama agar masyarakat penerima bantuan dapat lebih memahami baik teori maupun aplikasi/ praktik mengenai program bantuan di lapangan.

2. Sifat dana bantuan BSPS yang hanya boleh digunakan sebagai dana pembelian bahan bangunan, maka perlu adanya program dana yang dikhususkan untuk pembayaran tukang yang melaksanakan pembangunan dan diberikan kepada seluruh penerima bantuan. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat penerima bantuan secara materil untuk menyewa tukang maupun secara keahlian untuk mendirikan bangunan.
3. Perlu adanya pemberian pemahaman program (sosialisasi menyeluruh) kepada seluruh masyarakat desa, di luar penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai keberlangsungan program, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat bukan penerima bantuan terhadap masyarakat penerima bantuan.
4. Baik Unit Pelaksana Kerja dan Tenaga Pendamping Masyarakat perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka memahami dan mengetahui program ini adalah program dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat banyak melalui partisipasi masyarakat yang aktif, serta mengajak masyarakat untuk tetap ikut berpartisipasi ditengah kesibukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miles dan Huberman , 2004, *Qualitative Data Analisis, diterjemahkan Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Aulia, Dwira N. 2008. *Perumahan dan Permukiman*. Medan : USU Press.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group/Indiahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung : PT Alumni. Sastra
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. .

- Muhidin, Syarif. 1992. *Pemberdayaan Masyarakat (Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat)*
- Edi.2008.*KebijakanSosialsebagaiKebijakanPublik*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soejono. 2012. *SosiologiSuatuPengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Rian. 2012 *Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Nogi, Hessel 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balariung & Co
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Pasolong, Herbani 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman, 2017. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Budiman, Rusli. 2015. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publisher.
- Dokumen :
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang Tahun 2017-2019